

Analysis of Waste Management at Kopi Luhur Landfill: Public Administration Adaptation to Environmental Crisis in Cirebon City

Helsa Mutiara Rahmawati^{1*}, Nisa Aulia Apriliyanti², Sindi Nurazizah³
Universitas Swadaya Gunung Jati

Corresponding Author: Helsa Mutiara Rahmawati helsa.123090081@ugj.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Waste Management, Kopi Luhur Landfill, Public Administration, Environmental Crisis, Adaptive Policy

Received : 20, October

Revised : 22, December

Accepted: 24, February

©2026 Rahmawati, Apriliyanti, Nurazizah: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The issue of waste has transformed from a mere technical problem of disposal into a systemic challenge for public administration in developing cities. The waste management crisis at the Kopi Luhur landfill in Cirebon City is a manifestation of the unpreparedness of the public administration system in dealing with the surge in waste volume triggered by population growth and linear consumption patterns. The purpose of this study is to analyze waste management using the lens of public administration ecology to examine the natural, non-natural, and digital dimensions. The methodology used is descriptive qualitative based on literature review by collecting data from official agency websites, books, and scientific journals to ensure the validity of the findings. The findings show severe groundwater pollution with a Fecal Coliform concentration of 12,000 Jml/ml and a BOD level that exceeds the safe threshold for public consumption.

Analisis Tata Kelola Sampah TPA Kopi Luhur: Adaptasi Administrasi Publik terhadap Krisis Lingkungan di Kota Cirebon

Helsa Mutiara Rahmawati¹, Nisa Aulia Apriliyanti², Sindi Nurazizah³
Universitas Swadaya Gunung Jati

Corresponding Author: Helsa Mutiara Rahmawati helsa.123090081@ugj.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Tata Kelola Sampah, TPA Kopi Luhur, Administrasi Publik, Krisis Lingkungan, Kebijakan Adaptif

Received : 20, Oktober

Revised : 22, Desember

Accepted: 24, Februari

©2026 Rahmawati, Apriliyanti, Nurazizah: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Masalah sampah telah bertransformasi dari sekadar persoalan teknis pembuangan menjadi tantangan sistemik bagi administrasi publik di kota-kota berkembang. Krisis pengelolaan limbah di TPA Kopi Luhur Kota Cirebon merupakan manifestasi dari ketidaksiapan sistem administrasi publik dalam menghadapi lonjakan volume sampah yang dipicu oleh pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi masyarakat yang linear. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis tata kelola sampah menggunakan lensa ekologi administrasi publik untuk membedah dimensi alamiah, non-alamiah, dan digital. Metodologi yang digunakan deskriptif kualitatif berbasis kajian literatur dengan menghimpun data dari laman resmi instansi, buku, jurnal ilmiah guna menjamin validitas temuan. Temuan menunjukkan adanya pencemaran air tanah berat dengan konsentrasi Fecal Coliform sebesar 12.000 Jml/ml dan kadar BOD yang melampaui ambang batas aman bagi konsumsi warga.

PENDAHULUAN

Masalah sampah telah bertransformasi dari sekadar persoalan teknis pembuangan menjadi tantangan sistemik bagi administrasi publik di kota-kota berkembang. Misalnya, krisis di TPA Kopi Luhur Cirebon terjadi akibat meningkatnya volume sampah seiring pertumbuhan penduduk dan pola hidup konsumtif masyarakat. Volume sampah yang terus meningkat tidak dibarengi dengan infrastruktur yang memadai, menyebabkan TPA Kopi Luhur mencapai ambang batas kapasitasnya. Berdasarkan data, akumulasi sampah yang tidak tertangani dengan baik tidak hanya menjadi masalah estetika, namun juga membawa dampak signifikan pada kesehatan manusia serta kelangsungan ekonomi (Oktaviani, 2024). Sistem pengelolaan yang masih bersifat tradisional dan belum menekankan pengurangan dari sumber menyebabkan TPA mengalami kelebihan kapasitas serta menimbulkan dampak lingkungan. Pada umumnya, kondisi jumlah sampah yang semakin banyak akan menimbulkan dampak lainnya yaitu, polusi udara yang kian tidak sehat (Sukwika & Noviana, 2020).

Dalam ranah administrasi publik, pengelolaan sampah merupakan elemen integral dalam penyediaan layanan publik, yang secara langsung berdampak pada kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan di tingkat lokal saat ini masih terpaku pada metode konvensional yang berorientasi pada pembuangan akhir. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah belum sepenuhnya ditargetkan pada inisiatif pengurangan dan pengendalian yang dimulai dari titik asal. Ketergantungan pada tempat pembuangan akhir sebagai solusi definitif menyoroti kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan implementasi di lapangan, yang pada akhirnya menyebabkan inefisiensi dalam tata kelola sampah secara keseluruhan.

Sebagai kota bertipe sedang yang terus berkembang, Kota Cirebon menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan limbah padat akibat pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat (Isni et al., 2019). Hal ini selaras dengan catatan (Prihatin, 2020) bahwa kota bertipe sedang memiliki karakteristik unik di mana masalah sampah sebenarnya belum seakut kota metropolitan seperti Jakarta, namun jika tidak diantisipasi melalui perencanaan tata ruang yang matang, krisis lingkungan akan menjadi permanen.

Permasalahan utama terpusat di TPA Kopi Luhur, Kelurahan Argasunya, yang masih menerapkan sistem open dumping, sehingga pengelolaan sampah tidak optimal (Isni, 2019). Pada tahun 2022, dari total 282,291 m³ sampah harian, hanya sekitar 250 m³ yang terangkut ke TPA, sementara 32,291 m³ sisanya menumpuk di TPS atau dibuang secara ilegal ke lingkungan (Nurhanifah, 2024). Kondisi ini mencerminkan lemahnya kapasitas institusional birokrasi yang cenderung reaktif dan belum didukung perencanaan preventif terintegrasi, serta keterbatasan infrastruktur akibat minimnya anggaran (Choirunnisa & Sagita, 2025). Secara lebih spesifik, hambatan utama dalam tubuh birokrasi Dinas Lingkungan Hidup adalah kurangnya jumlah pegawai yang ahli secara teknis dalam pengelolaan sampah dan minimnya pendidikan pelatihan khusus. Keterbatasan kompetensi ini diperparah dengan kondisi sarana prasarana, di mana alat berat yang sering rusak dan jumlah armada pengangkut yang tidak

memadai membuat pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Kopi Luhur menjadi tidak optimal (Arisandi et al., 2019). Dampaknya, transisi dari open dumping ke controlled landfill gagal terlaksana dan kolaborasi dalam skema Collaborative Governance, termasuk keterlibatan sektor swasta melalui TJSL, belum optimal sehingga pembiayaan pengelolaan sampah masih sepenuhnya bergantung pada APBD yang terbatas.

Tetapi dari sisi lain, kerangka pengelolaan sampah belum memiliki dukungan teknologi yang memadai. Pengumpulan dan pemantauan data pengelolaan sampah masih merupakan proses manual, sehingga menyulitkan pemerintah daerah untuk menilai kebijakan secara tepat dan konsisten. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa modernisasi tata kelola pengelolaan sampah belum sepenuhnya terwujud, baik secara kelembagaan maupun dalam hal sistem pendukung administratif. Mengingat situasi ini, diperlukan strategi analitis untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah secara komprehensif dengan mempertimbangkan hubungan antara variabel lingkungan, sosial, dan administratif. Pendekatan ekologi administrasi publik dianggap tepat karena dapat memperjelas hubungan antara kebijakan publik, kemampuan birokrasi, dan lingkungan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam tata kelola TPA Kopi Luhur melalui pendekatan ekologi administrasi publik guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap krisis lingkungan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Tata Kelola Lingkungan dalam Administrasi Publik

Tata kelola lingkungan (environmental governance) berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas krisis ekologis di tingkat lokal maupun global. Dalam perspektif administrasi publik, tata kelola tidak lagi dimaknai sekadar sebagai fungsi birokrasi tradisional, tetapi sebagai kolaborasi multi-aktor yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Teori good governance menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, dan penegakan hukum. Dalam konteks pengelolaan sampah, prinsip ini mengharuskan pemerintah daerah mampu membangun sistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir.

Krisis Lingkungan dan Pengelolaan Sampah Perkotaan

Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi telah meningkatkan volume sampah secara signifikan di kota-kota Indonesia. Banyak Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) masih menggunakan sistem open dumping, yang menimbulkan pencemaran air tanah, udara, dan konflik sosial dengan masyarakat sekitar.

TPA Kopi Luhur

TPA Kopi Luhur merupakan lokasi pemrosesan akhir sampah utama di Kota Cirebon. Dalam berbagai laporan pemerintah daerah, TPA ini menghadapi tantangan berupa peningkatan volume sampah, keterbatasan lahan, serta kebutuhan modernisasi sistem pengolahan.

Literatur yang relevan menunjukkan bahwa TPA di kota menengah seperti Cirebon sering menghadapi dilema antara keterbatasan anggaran dan tuntutan peningkatan standar lingkungan. Oleh karena itu, analisis tata kelola TPA Kopi Luhur dapat diposisikan sebagai studi kasus tentang bagaimana administrasi publik lokal beradaptasi terhadap tekanan ekologis dan sosial.

METODOLOGI

Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih dalam penelitian ini untuk memperoleh pemahaman yang mendetail mengenai fenomena sosial secara komprehensif (Hasan et al., 2025). Penggunaan metode kualitatif sangat relevan dalam studi administrasi publik karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas interaksi antara kebijakan, sumber daya, dan dampak lingkungan. Sebagaimana dijelaskan oleh (Widodo et al., 2023), penelitian kualitatif berfokus pada interpretasi makna dan penjelasan mendalam mengenai konteks yang sedang diteliti.

Seluruh data yang dianalisis dalam studi ini diperoleh melalui sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi terhadap berbagai sumber valid, meliputi: website resmi badan pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon), dokumen laporan kinerja (LKIP 2024 dan Laporan Interim 2025), buku-buku ajar metodologi, serta jurnal-jurnal ilmiah bereputasi. Klasifikasi ini dilakukan untuk membantu peneliti menemukan hubungan antara faktor lingkungan fisik, kondisi sosial-ekonomi, dan kemampuan administrasi publik untuk mengelola sampah. Akibatnya, analisis tidak dilakukan secara parsial, tetapi secara terpadu, sehingga dapat menggambarkan dinamika tata kelola lingkungan secara keseluruhan.

Analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber untuk menjamin validitas hasil penelitian, yaitu dengan membandingkan data kinerja birokrasi dengan temuan dampak ekologis di lapangan (Hasan et al., 2025). Analisis data dalam studi ini mencakup pemilahan data yang relevan, penyajian informasi secara terstruktur serta perumusan simpulan berbasis pada teori ekologi administrasi publik. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan secara naratif dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori dan konsep administrasi publik, khususnya ekologi administrasi publik. Diharapkan bahwa metode ini akan membantu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dasar masalah tata kelola sampah dan membuat saran kebijakan yang kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Ekologis: Interaksi Faktor Alamiah dan Dampak Hidrologi

Hasil analisis menunjukkan bahwa degradasi lingkungan di TPA Kopi Luhur merupakan konsekuensi langsung dari interaksi antara letak geografis yang tidak strategis dan kegagalan infrastruktur teknis. Lokasi TPA yang sangat berdekatan dengan aliran Sungai Kalijaga menjadi faktor risiko utama bagi ekosistem air. Karakteristik tanah yang memiliki permeabilitas tertentu tanpa didukung oleh lapisan kedap air (*impermeable layer*) memicu terjadinya infiltrasi air lindi (*leachate*) secara kontinu ke dalam akuifer air tanah dan badan sungai. Berdasarkan data kualitas air, tercatat tingkat Fecal Coliform sebesar

12.000 Jml/ml, sebuah angka yang secara signifikan melampaui standar baku mutu sebesar 2.000 Jml/ml (Wibowo, 2017).

Pola persebaran polutan ini bergerak mengikuti kemiringan lereng serta dinamika hidrologi lokal, yang pada akhirnya mengancam kesehatan ekosistem air hingga ke wilayah hilir Kota Cirebon. Dampak ini semakin diperparah oleh kondisi geologis di mana sampel air sumur warga dalam radius 95-meter menunjukkan kadar BOD yang melebihi ambang batas aman. Hal ini mengindikasikan bahwa pencemaran tidak bersifat lokal di titik pembuangan saja, melainkan telah meluas melalui aliran air tanah yang menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap sumber air bersih untuk keperluan sehari-hari.

Dimensi Non-Alamiah: Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Selain faktor alamiah, tekanan terhadap lingkungan di kawasan TPA Kopi Luhur diperumit oleh dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang saling berkaitan. Secara sosial, terjadi ketegangan yang mendalam antara pemerintah dan masyarakat di wilayah Argasunya. Masyarakat terpapar eksternalitas negatif secara langsung, mulai dari bau menyengat hingga degradasi kualitas air, tanpa mendapatkan skema kompensasi lingkungan yang memadai (Surya, 2025) Resistensi publik ini termanifestasi dalam tindakan ekstrem, seperti penutupan sumur-sumur warga secara permanen karena kekhawatiran terhadap risiko kesehatan jangka panjang. Kegagalan manajemen di level TPA juga menciptakan efek domino sosial berupa munculnya titik-titik pembuangan sampah ilegal di kawasan lain, termasuk di Pantai Kesenden, di mana lahan bekas tambak digunakan secara menyimpang sebagai tempat pembuangan sampah liar (Choirunnisa & Sagita, 2025).

Dari sisi ekonomi, tata kelola sampah masih terjebak dalam model pembiayaan linier "Kumpul-Angkut-Buang" yang tidak berkelanjutan. Ketiadaan insentif ekonomi yang kuat untuk program Reduce, Reuse, Recycle (3R) menyebabkan sistem ekonomi sirkular tidak berjalan optimal, sehingga beban biaya operasional pemerintah terus membengkak tanpa adanya nilai tambah ekonomi dari pengolahan limbah (Amalia et al., 2023). Berdasarkan Laporan Interim Triwulan III Dinas Lingkungan Hidup (2025), terdapat kesenjangan signifikan antara target dan realisasi penanganan sampah yang dipicu oleh berbagai hambatan administratif. Masalah utama terletak pada keterbatasan armada akibat banyaknya sarana pengangkut yang telah melampaui umur teknis di tengah beban kerja yang terus meningkat, serta adanya defisit anggaran yang menyebabkan alokasi untuk pengembangan Bank Sampah masih jauh dari kebutuhan ideal (Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon | Laporan Kinerja Interim Triwulan III 2025, 2025).

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum, terutama terkait rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap izin lingkungan dan meluasnya tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal di daerah perbatasan. Masalah ini berakar pada lemahnya komitmen politik, di mana meskipun telah tersedia Perda Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018, implementasinya masih bersifat administratif di atas kertas tanpa adanya penegakan hukum (law enforcement) yang tegas serta alokasi anggaran yang memadai untuk modernisasi infrastruktur TPA (PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON 4 TAHUN 2018 SAMPAH, 2018).

Hambatan Digital dalam Tata Kelola Lingkungan Modern

Dimensi ketiga yang memperburuk kondisi pengelolaan sampah di Kota Cirebon adalah keterbatasan transformasi digital dalam sistem administrasi publik. Hingga saat ini, tata kelola sampah belum tersentuh secara integratif oleh teknologi informasi, terutama pada aspek pemantauan lapangan. Minimnya sistem monitoring real-time untuk pelaporan volume sampah dan optimasi rute pengangkutan menyebabkan inefisiensi dalam manajemen rantai pasok sampah. Teknologi pengolahan di TPA Kopi Luhur masih bersifat konvensional dan belum mengadopsi inovasi mutakhir seperti pemanfaatan teknologi waste-to-energy.

Lebih lanjut, ketiadaan sistem pendataan emisi gas rumah kaca berbasis digital yang akurat menjadi hambatan besar dalam merumuskan kebijakan mitigasi perubahan iklim yang berbasis data (data-driven policy). Ketergantungan pada metode pencatatan manual tidak hanya memperlambat respon birokrasi, tetapi juga menutup peluang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi kebijakan secara presisi terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan (Priyadi et al., 2020). Integrasi teknologi digital seharusnya menjadi prioritas guna menjembatani celah antara data ekologis lapangan dengan proses pengambilan keputusan administratif yang lebih responsif dan akuntabel.

Strategi Transformasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terpadu

Untuk mengatasi krisis pengelolaan sampah di TPA Kopi Luhur, Pemerintah Kota Cirebon perlu mengadopsi kebijakan strategis yang bersifat integratif dan komprehensif. Langkah utama dalam transformasi ini adalah penguatan kerangka regulasi melalui penyusunan atau revisi peraturan daerah yang secara tegas menekankan pada kewajiban pemilahan sampah langsung dari sumbernya, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, serta pengarusutamaan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Keberhasilan implementasi regulasi ini sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum melalui penerapan sanksi dan insentif yang proporsional. Pengawasan yang efektif menjadi prasyarat mutlak agar peraturan tersebut tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan instrumen perubahan perilaku yang nyata di tingkat akar rumput.

Selain aspek regulasi, penguatan pendekatan berbasis komunitas dan kolaboratif menjadi pilar penting dalam meminimalisir volume residu yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Pengembangan bank sampah dan optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS 3R) merupakan strategi kunci untuk mereduksi volume sampah sejak dini sekaligus memberdayakan masyarakat secara ekonomi (Mariane et al., 2025). Dalam konteks yang lebih luas, kemitraan antara sektor publik dan swasta perlu dieksplorasi lebih jauh guna meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong inovasi teknologi pengolahan. Sinergi ini harus didukung oleh sistem pemantauan dan evaluasi berbasis kinerja yang kuat agar kebijakan tetap adaptif dalam merespons dinamika lingkungan serta kebutuhan masyarakat Kota Cirebon yang terus berkembang.

Rekomendasi Integratif dan Penguatan Administrasi Publik

Berdasarkan evaluasi terhadap kebijakan saat ini, diperlukan penyesuaian yang lebih responsif dan berbasis lingkungan dengan mengalihkan paradigma dari sekadar pembuangan akhir (end-of-pipe) menuju pengurangan sampah di tingkat hulu. Kebijakan masa depan harus mampu menyatukan aspek ekologis, sosial, dan administratif guna mengurangi tekanan terhadap kapasitas TPA Kopi Luhur yang kian terbatas. Penguatan kapasitas lembaga administrasi publik menjadi kunci keberhasilan, yang meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah guna menghilangkan ego sektoral dalam tata kelola limbah.

Keterlibatan masyarakat sebagai mitra aktif pemerintah merupakan elemen fundamental dalam menghadapi krisis lingkungan secara berkelanjutan. Melalui program pendidikan lingkungan yang sistematis, pengembangan jejaring bank sampah, dan skema pemberian insentif yang menarik, masyarakat didorong untuk mengambil peran lebih besar dalam menjaga kualitas lingkungan. Pada akhirnya, perbaikan kualitas layanan publik dan pemulihan ekosistem di sekitar TPA Kopi Luhur hanya dapat dicapai melalui komitmen kolektif yang mengintegrasikan pengawasan berbasis data, partisipasi publik yang masif, dan tata kelola pemerintahan yang transparan serta berbasis hasil.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Krisis pengelolaan sampah di TPA Kopi Luhur merupakan manifestasi dari kegagalan sistemik yang melibatkan dimensi ekologis, sosial-ekonomi, dan administratif. Secara ekologis, lokasi yang tidak strategis serta infrastruktur yang kurang memadai telah mengakibatkan pencemaran berat pada ekosistem air tanah dan aliran sungai yang mengancam kesehatan masyarakat. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya kapasitas institusional birokrasi, keterbatasan anggaran operasional, serta minimnya inovasi digital dalam pemantauan limbah. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih bersifat administratif di atas kertas karena rendahnya penegakan hukum dan kurangnya sinergi kolaboratif antar pemangku kepentingan, yang pada akhirnya memperlambat proses pengelolaan sampah secara optimal dan tepat sasaran.

Maka dari itu, wujud langkah strategis ke depan, diperlukan penguatan penegakan hukum yang tegas terhadap Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 untuk menjamin kepatuhan seluruh pihak. Pemerintah Kota Cirebon harus segera melakukan transisi dari sistem pembuangan terbuka menuju sistem controlled landfill guna meminimalisir dampak kerusakan lingkungan lebih lanjut. Selain perbaikan teknis, pemberdayaan masyarakat melalui model ekonomi sirkular dan penguatan bank sampah menjadi kunci untuk mereduksi volume limbah sejak dari sumbernya. Selain itu, peningkatan kinerja sistem pengelolaan sampah dapat dipercepat melalui peningkatan kemampuan staf dan pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara real-time.

PENELITIAN LANJUTAN

Diharapkan masa depan Kota Cirebon akan memiliki sistem pengelolaan sampah yang tangguh dan berkelanjutan melalui integrasi kebijakan yang adaptif, modernisasi infrastruktur, dan partisipasi publik yang masif. Ini akan menjadi contoh pengelolaan sampah perkotaan yang mampu menyeimbangkan pembangunan, ekologi, dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A., Giastuti, A. H., Lestari, A. P., Pratiwi, S., & Prayoga, A. (2023). Laporan Kajian Data Timbulan Dan Komposisi Sampah Di 6 Kota/Kabupaten Di Indonesia.
- Arisandi, R., Nariyah, H., & Nursahidin. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Tempat Penampungan Sampah Sementara Terminal Weru). *Jurnal Publika Unswagati Cirebon*, 7(2), 107-113.
- Choirunnisa, I. S., & Sagita, N. I. (2025). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah (Studi Pada Kawasan Pesisir Pantai Kesenden Kota Cirebon Tahun 2023). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 9(2), 1110-1122. <https://doi.org/10.31604/jim.v9i2.2025.1110-1122>.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon | Laporan Kinerja Interim Triwulan Iii 2025. (2025).
- Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., Dewi, P. M., Asroni, A., Yunesman, Merjani, A., & Hakim, A. R. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif* (Rudy, Ed.). Penerbit Tri Edukasi Ilmiah.
- Isni, N. N. (2019). Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir (Tpa) Sampah Kopi Luhur Berdasarkan Penilaian Indeks Risiko Lingkungan Di Dusun Sumur Wuni, Kelurahan Argasanya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
- Isni, N. N., Sungkowo, A., Wahyuning, I., Jurusan, W., Lingkungan, T., Mineral, F. T., Veteran, U. ", & Yogyakarta, ". (2019). Upaya Teknis Rehabilitasi Tpa Sampah Kopi Luhur Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali (Vol. 2, Issue 1). <https://doi.org/10.31315/jilk.v2i1.3287>.

- Mariane, I., Gnagey, M. R., Karali, M. A. M. I., & Hardiyanti, E. (2025). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(1), 93-108. <https://doi.org/10.23969/Kebijakan.V16i01.9934>.
- Nurhanifah, A. (2024). Kolaborasi Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Cirebon. Universitas Diponegoro.
- Oktaviani, D. A. (2024). Efektivitas Tata Kelola Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah. Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- Peraturan Daerah Kota Cirebon 4 Tahun 2018 Sampah (2018).
- Prihatin, R. B. (2020). Pengelolaan Sampah Di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus Di Kota Cirebon Dan Kota Surakarta. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 1-16. <https://doi.org/10.22212/Aspirasi.V11i1.1505>.
- Priyadi, H., Marlinang, N., Kristanti, A., & Aldian, D. (2020). Laporan Kajian Perkotaan Cirebon.
- Sukwika, T. , & Noviana, L. (2020). Status Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Terpadu Di Tpst-Bantargebang, Bekasi: Menggunakan Rappfish Dengan R Statistik. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(1), 107-118. <https://doi.org/10.14710/Jil.18.1.107-118>.
- Surya, M. (2025). Berada Di Atas Pemukiman Kampung Kalilunyu Argasunya, Limbahh Tpa Kopi Luhur Cirebon Cemari Sumur Warga. <https://suaracirebon.com/2025/08/11/Berada-Di-Atas-Permukiman-Kampung-Kalilunyu-Argasunya-Limbah-Tpa-Kopi-Luhur-Cirebon-Cemari-Sumur-Warga/>
- Wibowo, D. A. (2017). Dampak Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Sampah Kopiluhur Terhadap Kondisi Lingkungan Di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Widodo, S., Ladyani, F., Asrianto, L. O., Dalfian, Nurcahyati, S., Devriany, A., Khairunnisa, Lestari, S. M. P., Rusdi, Wijayanti, D. R., Hidayat, A., Sjahriani, T., Armi, Widya, N., & Rogayah. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian*. Cv Science Techno Direct.